

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON  
Jln Sunan Muria No. 04 Sumber**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan program pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023.

Semoga Dokumen ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumber, Juli 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
CIREBON



**H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670208 199403 1 013

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2023</b>	9
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Tahun 2023.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	48
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	51
3.3 Program dan Kegiatan .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	61
<b>LAMPIRAN</b>	



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. -Disdukcapil/2023

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Sebagai suatu dokumen resmi yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan tegas bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang

dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk. Dalam hal ini yang dimaksud adalah instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan untuk tingkat kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai komitmen mewujudkan Sistem administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan berjalan baik dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pelayanan publik serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra PD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra PD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RKA/DPA;

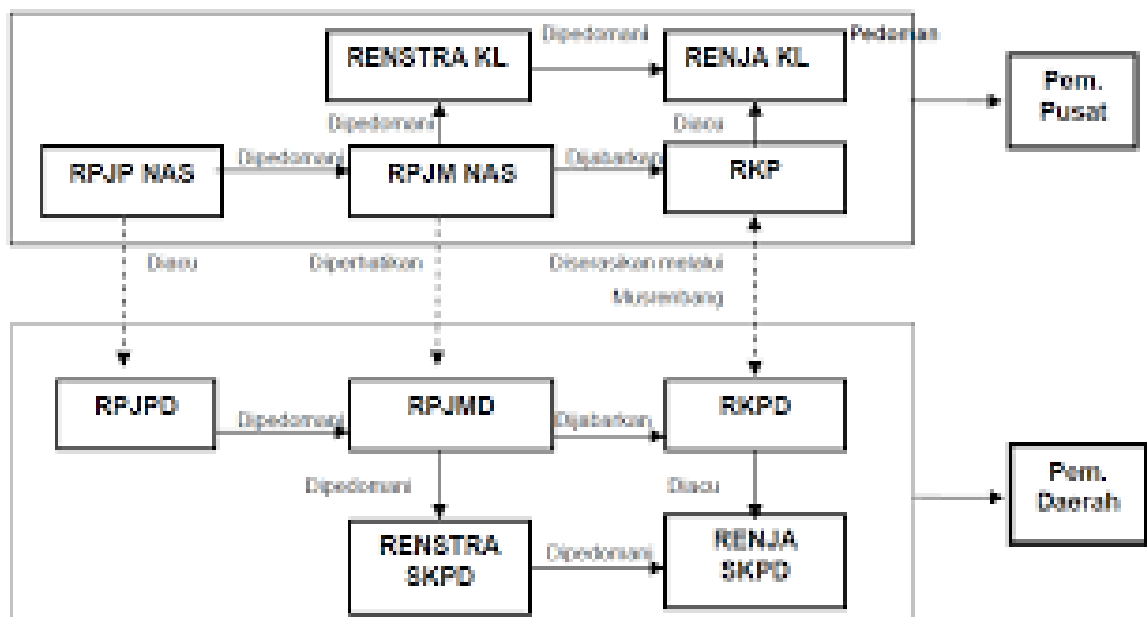
- Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PD; untuk memastikan RKA telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Rencana Kerja
- Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
- Penyusunan rancangan Rencana Kerja
- Pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja
- Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
- Penetapan Rencana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya perlu menyusun rencana kerja sebagai bentuk perencanaan untuk menyelaraskan pelaksanaan program kegiatan dan merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kerja anggaran dinas pada tahun 2023 dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas.

Bagan Keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, Renja K/L



## 2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136)
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781)
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- q. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- s. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
- t. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah

- a. sebagai dokumen perubahan perencanaan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2023 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

- b. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan tujuan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.

#### **4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4 Riview terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kerja Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI, ANALISIS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

#### 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTER I TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 2 (dua) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan.
  - 2) Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap.
- a) Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja semester 1 Tahun 2023 ( Per 30 Juni 2023 ) adalah sebagai berikut :

No	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Sisa DPA	Persen (%)
	<b>URUSAN ADMINDUK</b>	<b>2,045,844,200</b>	<b>677,300,180</b>	<b>1,368,544,020</b>	<b>33.11%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1,282,346,800</b>	<b>343,301,160</b>	<b>939,045,640</b>	<b>26.77%</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1,274,316,400</b>	<b>338,777,960</b>	<b>935,538,440</b>	<b>26.59%</b>
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1,156,772,700	287,176,800	869,595,900	24.83%
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	47,999,900	19,272,100	28,727,800	40.15%
3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	69,543,800	32,329,060	37,214,740	46.49%
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>8,030,400</b>	<b>4,523,200</b>	<b>3,507,200</b>	<b>56.33%</b>
4	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	8,030,400	4,523,200	3,507,200	56.33%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>317,550,400</b>	<b>149,197,840</b>	<b>168,352,560</b>	<b>46.98%</b>
<b>3</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>317,550,400</b>	<b>149,197,840</b>	<b>168,352,560</b>	<b>46.98%</b>

No	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Sisa DPA	Persen (%)
5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	287,960,400	136,706,840	151,253,560	47.47%
6	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29,590,000	12,491,000	17,099,000	42.21%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>397,395,000</b>	174,904,960	222,490,040	44.01%
<b>4</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>103,749,500</b>	<b>29,818,600</b>	<b>73,930,900</b>	<b>28.74%</b>
7	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	34,927,000	8,200,000	26,727,000	23.48%
8	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	68,822,500	21,618,600	47,203,900	31.41%
<b>5</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>293,645,500</b>	<b>145,086,360</b>	<b>148,559,140</b>	<b>49.41%</b>
9	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	293,645,500	145,086,360	148,559,140	49.41%
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>48,552,000</b>	<b>9,896,220</b>	<b>38,655,780</b>	<b>20.38%</b>
<b>6</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>48,552,000</b>	<b>9,896,220</b>	<b>38,655,780</b>	<b>20.38%</b>
10	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	48,552,000	9,896,220	38,655,780	20.38%

Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut : **Tabel Capaian Kinerja s.d 30 Juni 2023**

NO	KEGIATAN	TARGET 2023	PENCAPAIAN smstr I / 2023
1	Penerbitan Kartu Keluarga	220.000	110.324
2	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	200,000	71.524
3	Kartu Identitas Anak (KIA)	100.000	9.065
4	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65,000	30.755
5	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	12.000	4.007
6	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	Akta Perkawinan	50	28

NO	KEGIATAN	TARGET 2023	PENCAPAIAN smstr I / 2023
	Akta Perceraian	10	1
	Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan ANak	25	20

Sumber : Data Simonek s.d 30 Juni 2023

b) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Alokasi anggaran untuk Program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 1.282.346.800,- dan terealisasi Semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 343.301.160,- sisa sebesar Rp. 939.045.640,- atau tercapai sebesar 26,77%.

**Outcome Program** ini adalah Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA, Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK ) dan Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp.1.274.316.400,- dan terealisasi Semester I Tahun 2023 sebesar RP. 338.777.960,- sisa sebesar Rp. 935.538.440,- atau tercapai sebesar 26,59%.

**Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan

Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.156.772.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 287.176.800,- sisa sebesar Rp. 869.595.900,- atau tercapai sebesar 24,83%.

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.272.100,- dan terealisasi sebesar Rp.47.999.900,- sisa sebesar Rp 28.727.800,- atau tercapai sebesar 40,15%

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.543.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.329.060,- sisa sebesar Rp. 37.214.740,- atau tercapai sebesar 46,49%

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 8.030.400,- dan terealisasi Semester I Tahun 2023 sebesar RP. 4.523.200,- sisa sebesar Rp3.507.200,- atau tercapai sebesar 56,33%.

**Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan

Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.030.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.523.200,- sisa sebesar Rp3.507.200,- atau tercapai sebesar 56,33%..

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk

2. Program Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran untuk Program Pencatatan Sipil sebesar Rp.317.550.400,- dan terealisasi Semester I Tahun 2023



sebesar Rp. 149.197.840,- sisa sebesar Rp. 168.352.560,- atau tercapai sebesar 46,98%.

**Outcome Program** ini adalah Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAK, Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan ( Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar Rp.317.550.400,- dan terealisasi Semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 149.197.840,- sisa sebesar Rp. 168.352.560,- atau tercapai sebesar 46,98%.

**Output Kegiatan** ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.960.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.706.840,- sisa sebesar Rp. 151.253.560,- atau tercapai sebesar 47,74%.

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

- b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.590.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.491.000,- sisa sebesar Rp. 17.099.000,- atau tercapai sebesar 42,21%

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 397.395.000,- dan

terrealisasi sebesar Rp.174.904.960,- sisa sebesar Rp. 222.490.040,- atau tercapai sebesar 44,01%.

**Outcome Program** ini adalah Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) dan telah didukung dengan Aplikasi khusus dan Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.103.749.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.818.600,- sisa sebesar Rp. 73.930.900,- atau tercapai sebesar 28,74%

**Output Kegiatan** ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.927.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.200.000,- sisa sebesar Rp. 26.727.000,- atau tercapai sebesar 23,48%.

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan.

- b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.822.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.618.600,- sisa sebesar Rp. 47.203.900,- atau tercapai sebesar 31,41%

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.293.645.500,- dan terealisasi semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 145.086.360,- sisa sebesar Rp. 148.559.140,- atau tercapai sebesar 49,41%.

**Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang terselenggara.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.645.500,- dan terealisasi semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 145.086.360,- sisa sebesar Rp. 148.559.140,- atau tercapai sebesar 49,41%

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

#### 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar Rp.48.552.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 9.896.220,- sisa sebesar Rp. 38.655.780,- atau tercapai sebesar 20,38%.

**Outcome Program** ini adalah Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.48.552.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 9.896.220,- sisa sebesar Rp. 38.655.780,- atau tercapai sebesar 20,38%.

**Output Kegiatan** ini Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.552.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 9.896.220,- sisa sebesar Rp. 38.655.780,- atau tercapai sebesar 20,38%.

**Sub Outputnya** adalah Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.

**TABEL 1**  
**TABEL EVALUASI RENJA PD TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN 2023 S.D SEMESTER I ( TW II )**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipenuhi												
			Prosentase Peningkatan Laporan keuangan yang telah dipenuhi dari yang seharusnya												
			Prosentase Peningkatan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya												
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat</b>		<b>516,163,000</b>		<b>66,410,780</b>		<b>285,072,200</b>		<b>139,687,900</b>		<b>424,760,100</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan												

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	120,000,000	1	26,348,320	6	85,158,100	8	39,847,900	8	125,006,000	100%	104%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan (LPPD,LKPJ, LAKIP, IKU dan PERKIN)												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	149,976,000	5	6,290,500	12	149,976,000	5	32,757,700	17	182,733,700	100%	122%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan IKM												
			Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	8	246,187,000	1	33,771,960	6	49,938,100	2	67,082,300	8	117,020,400	100%	48%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen / laporan Admnsitrasi Keuangan yang dibuat</b>		<b>39,554,351,200</b>		<b>3,424,723,530</b>		<b>23,266,763,300</b>		<b>6,624,397,500</b>		<b>29,891,160,800</b>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan												

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
			Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan ASN												
			Jumlah Oran yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252	39,475,343,000	47	3,419,723,530	170	23,240,776,700	63	6,616,564,700	233	29,857,341,400	92%	76%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	45,675,600	1	5,000,000	3	15,081,200	1	5,000,000	4	20,081,200	100%	44%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselesaikan												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	55	33,332,600	0	0	36	10,905,400	18	2,832,800	54	13,738,200	98%	41%

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan</b>		<b>160,000,000</b>		<b>61,425,000</b>				<b>61,850,250</b>		<b>61,850,250</b>		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140	160,000,000	105	61,425,000	0	0	105	61,850,250	105	61,850,250	75%	39%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan kantor</b>		<b>37,401,626,300</b>		<b>96,251,000</b>				<b>7,748,603,900</b>		<b>25,129,299,365</b>		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	102,000,000	1	5,205,600	3	32,799,100	1	7,999,700	4	40,798,800	100%	40%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	20,306,850,000	2	40,084,000	9	11,119,080,990	3	563,477,000	12	11,682,557,990	100%	58%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	11,790,000	1	1,069,500	6	4,123,800	2	2,352,900	8	6,476,700	100%	55%



**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jamuan makan yang disiapkan												
			Jumlah jamuan snack yang disiapkan												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	93,499,400	0	2,500,000	6	23,880,000	2	5,500,000	8	29,380,000	100%	31%
		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	4	405,120,000	0	0	3	122,409,700	1	10,000,000	4	132,409,700	100%	33%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	225,200,000	2	9,512,000	3	44,586,000	1	22,050,000	4	66,636,000	100%	30%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang tersedia												
			Jumlah Jenis penunjang pencetakan KTP El dan KIA (Tinta Full Color Ribbon, HDP Film dan Cleaning Kit)												
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16	16,009,286,900	0	2,880,000	12	5,666,796,800	4	7,072,231,700	16	12,739,028,500	100%	80%

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315	653,000,000	23	34,999,900	172	489,428,775	25	74,992,600	197	564,421,375	63%	86%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>		<b>2,345,800,000</b>		<b>101,246,778</b>		<b>792,883,916</b>		<b>303,765,900</b>		<b>1,096,649,816</b>		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di bayar												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	13	1,615,800,000	3	75,454,357	9	704,659,916	3	242,458,900	12	947,118,816	92%	59%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	700,000,000	0	25,792,421	3	81,474,000	1	61,307,000	4	142,781,000	100%	20%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pelindung diri yang tersedia												

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	30,000,000	0	0	1	6,750,000	0	0	1	6,750,000	25%	23%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional roda empat dan roda dua yang disediakan</b>		<b>4,050,000,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	4,050,000,000							0	-	0%	0%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan BMD Yang Sesuai Standard Kebutuhan Pelayanan Prima.</b>		<b>1,892,099,000</b>		<b>179,609,560</b>		<b>1,393,299,300</b>		<b>609,448,700</b>		<b>2,002,748,000</b>		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan/STNK bermotor roda dua yang terbayarkan												
			Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda empat yang terbayarkan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117	152,940,600	1	29,090,500	51	34,887,500	15	106,900,000	66	141,787,500	56%	93%

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM												
			Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	114	475,875,000	6	12,741,400	94	279,100,000	20	30,804,700	114	309,904,700	100%	65%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati												
			Jumlah tenaga pengamanan dan kebersihan kantor yang dibayar												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1,263,283,400	1	137,777,660	3	1,079,311,800	1	471,744,000	4	1,551,055,800	100%	123%

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap	Rata-rata Prosentase Keluarga dengan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap ( KK, KTPel, KIA, Akta Kelahiran 0-18 thn )												
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA												
			Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK )												
			Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El												
		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan</b>		<b>9,123,373,400</b>		<b>338,777,960</b>		<b>6,953,562,300</b>		<b>1,274,316,400</b>		<b>8,227,878,700</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik												
			Terbitnya Kartu Identitas Anak ( KIA )												
			Terbitnya Kartu Keluarga												
			Jumlah operator SIAK dan Admin yang mendukung pelayanan Adminduk di dinas dan kecamatan yang terbayarkan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12	7,674,500,000	1	287,176,800	9	5,999,825,800	3	1,156,772,700	12	7,156,598,500	100%	93%
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP El												
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	198,560,000	5	19,272,100	3	756,989,800	1	47,999,900	4	804,989,700	100%	405%
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pemohon yang menerima layanan Surat keterangan pindah, datang, SKTT												

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	1,250,313,400	1	32,329,060	9	196,746,700	3	69.543.800	12	266,290,500	100%	21%
		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan</b>		<b>290,000,000</b>		<b>4,523,200</b>		<b>16,226,700</b>		<b>8,030,400</b>		<b>24,257,100</b>		
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah warga yang terfasilitasi Adminstrasi Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2	290,000,000	0	4,523,200		16,226,700	1	8,030,400	1	24,257,100	50%	8%
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAK												
			Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan ( Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak)												

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan</b>		<b>3,389,842,780</b>		<b>149,197,840</b>		<b>1,393,347,800</b>		<b>317,550,400</b>		<b>1,710,898,200</b>		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran												
			Terbitnya Dokumen Akta Kematian												
			Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan												
			Terbitnya Dokumen Akta perceraian												
			Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak												
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20	2,650,142,880	2	136,706,840	15	1,251,888,000	5	287,960,400	20	1,539,848,400	100%	58%
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Digitalisasi Arsip Pelayanan Sipil berbasis IT												
			Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile penerbitan akta kelahiran												



**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20	739,699,900	2	12,491,000	15	141,459,800	5	29,590,000	20	171,049,800	100%	23%
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) dan telah didukung dengan Aplikasi khusus												
			Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik												
		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan</b>		<b>869,300,000</b>		<b>29,818,600</b>		<b>138,648,700</b>		<b>103,749,500</b>		<b>242,398,200</b>		
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen Database Penduduk yang Valid												
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	20	466,599,000	1	8,200,000	15	84,166,900	5	34,927,000	20	119,093,900	100%	26%
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan												
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	42	402,701,000	9	21,618,600	14	54,481,800	20	68,822,500	34	123,304,300	81%	31%

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Cirebon tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2023		Capaian Kinerja s/d semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 X 100%	
		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang terselenggara</b>		<b>2,928,724,680</b>		<b>145,086,360</b>		<b>849,576,400</b>		<b>293,645,500</b>				
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Terpeliharanya jumlah unit jaringan SIAK untuk mendukung penyajian data yang akurat												
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	8	2,928,724,680	1	145,086,360	6	849,576,400	2	293,645,500	8	1,143,221,900	100%	39%
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan												
		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan</b>		<b>313,038,000</b>		<b>9,896,220</b>		<b>131,937,800</b>		<b>48,552,000</b>		<b>180,489,800</b>		
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir												
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4	313,038,000	0	9,896,220	3	131,937,800	1	48,552,000	4	180,489,800	100%	58%
<b>JUMLAH</b>					<b>99,159,438,360</b>		<b>4,606,966,828</b>		<b>52,717,673,581</b>		<b>17,543,598,350</b>		<b>70,261,271,931</b>		

TABEL 2.1  
PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUNAN					TARGET TAHUNAN			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		41,714	49,233	53,674	5,553	44,976	65,000	65,000	65,000	65,000
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>												
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>												
	<b>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</b>												
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		33,122	36,189	43,707	46,370	39,826				
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>												

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUNAN					TARGET TAHUNAN			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>												
	<b>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</b>												
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.										
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		18%	21%	22,7%	22,4%	17,6%				

Dari Tabel 2.1 dapat diterangkan bahwa adanya realisasi yang capaiannya kosong disebabkan karena adanya refocusing yang mengaruskan sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan adanya capaian yang melebihi 100% hal tersebut disebabkan adanya pemohon yang mengajukan cetak ulang KTP El karena berbagai factor hal tersebut membuat prosentase cetaknya melebihi 100 %, sementara untuk capaian penerbitan KIA masih rendah hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya mesin pencetakan dan pada tahun 2020 sama sekali tidak ada penerbitan/pencetakan KIA.

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019 – 2024, ada 2 (dua) sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2023, dan ada 1 (satu) sasaran yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu :

### 1. Meminimalisir keluhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan dokumen identitas kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, 2023 target penerbitan KTP-El sebanyak 250.000 keping dan KK sebanyak 260.000. Realisasi untuk pada Semester I tahun 2023 ini penerbitan KTP sebanyak 71.524 keping dan KK sebanyak 110.324 lembar.

### 2. Terlayannya Hak-hak Status Pribadi dan Status Hukum Bagi Penduduk

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil dengan target penerbitan Akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 sejumlah 65.000 lembar, adapun realisasi adalah sebagai berikut :

**TABEL CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SMESTER I TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	TARGET 2023	PENCAPAIAN smstr I / 2023
1	Penerbitan Kartu Keluarga	220.000	110.324
2	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	200,000	71.524
3	Kartu Identitas Anak (KIA)	100.000	9.065
4	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65,000	30.755
5	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	12.000	4.007
6	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	Akta Perkawinan	50	28
	Akta Perceraian	10	1

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>PENCAPAIAN smstr I / 2023</b>
	Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan ANak	25	20

Sumber Data : Simonek Semester I Tahun 2023

**TABEL 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Perekaman KTP Elektronik		V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>99,23 %</b>	100%	100%	100%	
2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		V	28.92%	32.74%	37.50%	44.18%	23.70%	24,76%	<b>27.76%</b>	28.39%	31.51%	<b>40%</b>	
3	Kepemilikan akta kelahiran		V	35%	39.75%	42.7%	45.64%	38,60%	39,17%	<b>26,47%</b>	40,00%	Dengan Siak Terpusat Tdk dpt dihitung	Dengan Siak Terpusat Tdk dpt dihitung	Prosenstase Kepemilikan Akta yang sudah terkonversi ke dalam Database SIAK
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		V	27.40%	41.10%	68.5%	82.2%	27.40%	27.40%	<b>5,63 %</b>	27.40%	27.40%	27.40%	Berdasarkan Permendagri No 102 Tahun 2019

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan Adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus -menerus, antara lain melalui:
  - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK Terpusat.
  - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP)

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

#### a. Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon



5. Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi

b. Faktor Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)

Kelemahan atau hambatan-hambatan internal yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugas, antara lain:

Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal, terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumberdaya manusia (SDM);

1. Pemahaman dan penegakan hukum dari berbagai kebijakan dan regulasi tersebut masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari pemanfaatan TIK untuk penegakan “E-Government for Good Government” belum berjalan secara optimal;
2. Belum seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon mempunyai alat perekaman KTP el, sehingga pelayanan perekaman KTP-el harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau kecamatan terdekat;
3. Terbatasnya anggaran dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai sesuai kebutuhan
5. Belum memadainya sarana dan prasarana

c. Faktor Peluang Organisasi (*Opportunities*)

- 1) Adanya penerapan nyata Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Noor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Kebijakan Pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukab dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, integritas dan profesional
- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Perkembangan teknologi informasi memeberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan public. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersbut.

d. Faktor Tantangan Organisasi (Threats) :

Tantangan atau kondisi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, antara lain:

1. Tuntutan masyarakat, akan output yang berkualitas dari database kependudukan yang semakin tinggi, sementara situasi untuk memenuhi tuntutan tersebut masih banyak mengalami kendala antara lain belum seluruh kecamatan di Indonesia mempunyai alat perekaman KTP-el;
2. Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi,
3. sehingga rentan terhadap berbagai keluhan dan dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan output yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Layanan administrasi kependudukan yang tidak optimal akan menyebabkan kepedulian stakeholders menjadi rendah terhadap tertib administrasi kependudukan;
5. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus dokumen administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk mendukung pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance) melalui pelayanan public urusan administrasi kependudukan.

Dalam Menyusun Rencana Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh Misi ke-4 (empat) yaitu *“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”* untuk terwujudnya Visi Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”*

Untuk mencapai Visi Kabupaten Cirebon seperti tersebut di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugasnya harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan salah satu instansi yang ada di Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh

karena itu maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon akan memfokuskan kepada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan ke dalam Renstra OPD, maka pada setiap awal tahun masing-masing OPD Menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal Renstra dengan memperhatikan kebutuhan OPD dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang berbeda yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Tahun 2019-2024.

Dengan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut maka dalam penyusunan Renja OPD tahun 2022 harus menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru, sehingga program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 harus tetap sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan oleh Bupati Cirebon dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui sejauh mana relevansi rancangan awal OPD yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.3 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Riview Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang /Bertambah	
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah		
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap</b>												
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>														
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			Disdukcakil	Disdukcakil	3	3	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3	3	1,156,772,700	1,156,772,700	-	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Disdukcakil	Disdukcakil	1	1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	47,999,900	47,999,900	-	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Disdukcakil	Disdukcakil	3	3	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3	3	69,543,800	69,543,800	-	
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>			Disdukcakil	Disdukcakil										-
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			Disdukcakil	Disdukcakil	1	1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1	1	8,030,400	8,030,400	-	
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			Disdukcakil	Disdukcakil										-
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		Disdukcakil	Disdukcakil										-	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Disdukcapi	Disdukcapi	5	5	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5	5	287,960,400	287,960,400	-
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Disdukcapi	Disdukcapi	5	5	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5	5	29,590,000	29,590,000	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									-
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									-
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Disdukcapi	Disdukcapi	5	5	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5	5	34,927,000	34,927,000	-
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Disdukcapi	Disdukcapi	20	20	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	20	68,822,500	68,822,500	-
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									-
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan		Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1	1	293,645,500	293,645,500	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									-
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									-
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	1	48,552,000	48,552,000	-

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Disdukcakil	Disdukcakil												-	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Disdukcakil	Disdukcakil													-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Disdukcakil	Disdukcakil	2	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	39,847,900	39,847,900					-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Disdukcakil	Disdukcakil	5	5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	7,500,000	7,500,000					-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Disdukcakil	Disdukcakil	2	2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2	2	67,082,300	67,082,300					-
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Disdukcakil	Disdukcakil													-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Disdukcakil	Disdukcakil	63	63	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	63	6,616,564,700	6,616,564,700					-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Disdukcakil	Disdukcakil	1	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5,000,000	5,000,000					-

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Disdukcapil	Disdukcapil	18	18	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	2,832,800	2,832,800	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Disdukcapil	Disdukcapil									-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	61,850,250	61,850,250	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Disdukcapil	Disdukcapil									-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	7,999,700	7,999,700	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Disdukcapil	Disdukcapil	3	3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	563,477,000	1,148,701,000	<b>585,224,000</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Disdukcapil	Disdukcapil	2	2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	2,352,900	2,352,900	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Disdukcapil	Disdukcapil	2	2	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	5,500,000	5,500,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	10,000,000	10,000,000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	22,050,000	22,050,000	-

	Penyediaan Bahan/Material		Disdukcapi	Disdukcapi	4	4	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	4	5,072,231,700	6,072,213,300	<b>999,981,600</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Disdukcapi	Disdukcapi	25	25	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	74,992,600	191,857,000	<b>116,864,400</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Disdukcapi	Disdukcapi		5	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4	-	151,008,000	<b>151,008,000</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Disdukcapi	Disdukcapi	3	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	3	242,458,900	258,280,900	<b>15,822,000</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	61,307,000	192,407,000	<b>131,100,000</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Disdukcapi	Disdukcapi									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Disdukcapi	Disdukcapi	15	15	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	106,900,000	106,900,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Disdukcapi	Disdukcapi	20	20	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	30,804,700	30,804,700	-



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Cirebon tahun 2023**

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	471,744,000	471,744,000	-
												<b>15,518,340,650</b>	<b>17,518,340,650</b>	<b>2.000.000.000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penyelarasan dan penajaman Rencana Kerja Tahun 2023 telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 17 Februari 2022 yang dihadiri oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang dilaksanakan sejalan dengan keinginan masyarakat, bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hanya sebagian dari usulan masyarakat namun secara keseluruhan sebenarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menggambarkan keinginan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon di tingkat kecamatan yang mengusulkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk tahun 2023 ada 6 kecamatan yaitu Kecamatan Waled, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Palimanan

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 07. Penyediaan Bahan/Material;	KECAMATAN WALED	Pemenuhan Sarana Penunjang rekaman dan Pencetakan Adminsitasi Kependudukan	1 paket 88.000.000	
2	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 07. Penyediaan Bahan/Material;	KECAMATAN ASTANAJAPURA	Pemenuhan Sarana Penunjang rekaman dan Pencetakan Adminsitasi Kependudukan	1 paket 88.000.000	
3	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 07. Penyediaan Bahan/Material;	KECAMATAN GEBANG	Pemenuhan Sarana Penunjang rekaman dan Pencetakan Adminsitasi Kependudukan	1 paket 88.000.000	
4	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 07. Penyediaan Bahan/Material;	KECAMATAN PANGENAN	Pemenuhan Sarana Penunjang rekaman dan Pencetakan Adminsitasi Kependudukan	1 paket 88.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
5	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	KECAMATAN PABUARAN	Pemenuhan Sarana Perekaman dan cetak Administrasi Kependudukan	1 paket 210.000.000	
6	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	KECAMATAN PALIMANAN	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Pencetakan Administrasi Kependudukan	1 paket 210.000.000	
				<b>772.000.000</b>	

Untuk menampung usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menyelaraskan pada program/kegiatan/sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan 7 (tujuh) kegiatan strategis yaitu :

1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu;
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
3. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
4. Pembinaan Administrasi encatatan Sipil;
5. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
7. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai instansi pelaksana urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar telah melaksanakan 2 (dua) dari 7 (tujuh) kegiatan strategis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Rencana Kerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai kegiatan / program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

#### **Tujuan**

*Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik*

#### **Sasaran**

- a) *Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan;*
- b) *Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap;*

#### **Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Thn 2023</b>	<b>Satuan</b>
<i>Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik</i>		<i>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</i>	3,15	<i>Point</i>
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Persen
	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Rata-rata Prosentase Keluarga dengan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap ( KK, KTPel, KIA, Akta Kelahiran 0-18 thn )	85	Persen

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon ikut mengambil peran dalam merelaisasikan tema Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.

Untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 telah Menyusun program dan kegiatan yang mengacu pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menyelenggarakan pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar dalam Pelayanan Publik yang terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

#### **Kegiatan**

Program dan kegiatan pada tahun 2023 meliputi 5 program 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang terdiri dari :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepepegawaian Perangkat Daerah**
  - 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 12 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 14 Penyediaan Bahan/Material
  - 15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 16 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 18 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**

**8. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

22 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

23 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

24 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

**9. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

25 Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

**3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**

**10. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**

26 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

27 Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

**4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**11. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

28 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

29 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

**12. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

30 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan

**5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**

**13. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**

31 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Rencana Kerja Perubahan 2023 dan jadwal pelaksanaan program/kegiatan terlampir.



**TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang /Bertambah		
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah			
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap</b>													
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>															
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			Disdukcapil	Disdukcapil	3	3	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3	3	1,156,772,700	1,156,772,700			-
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	47,999,900	47,999,900			-
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Disdukcapil	Disdukcapil	3	3	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3	3	69,543,800	69,543,800			-
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>			Disdukcapil	Disdukcapil											-
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1	1	8,030,400	8,030,400			-
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			Disdukcapil	Disdukcapil											-
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		Disdukcapil	Disdukcapil											-	

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang /Bertambah
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			Disdukcapi	Disdukcapi	5	5	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5	5	287,960,400	287,960,400	-
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			Disdukcapi	Disdukcapi	5	5	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5	5	29,590,000	29,590,000	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			Disdukcapi	Disdukcapi									-
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			Disdukcapi	Disdukcapi									-
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Disdukcapi	Disdukcapi	5	5	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5	5	34,927,000	34,927,000	-
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			Disdukcapi	Disdukcapi	20	20	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	20	68,822,500	68,822,500	-
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			Disdukcapi	Disdukcapi									-
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan			Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1	1	293,645,500	293,645,500	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>			Disdukcapi	Disdukcapi									-

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang /Bertambah		
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah			
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>		<b>Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan</b>	Disdukcapi	Disdukcapi										-	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain			Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	1	48,552,000	48,552,000			-
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			Disdukcapi	Disdukcapi											-
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Disdukcapi	Disdukcapi											-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Disdukcapi	Disdukcapi	2	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	39,847,900	39,847,900			-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Disdukcapi	Disdukcapi	5	5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	7,500,000	7,500,000			-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Disdukcapi	Disdukcapi	2	2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2	2	67,082,300	67,082,300			-
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Disdukcapi	Disdukcapi											-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Disdukcapi	Disdukcapi	63	63	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	63	6,616,564,700	6,616,564,700			-	

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang /Bertambah
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5,000,000	5,000,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Disdukcapi	Disdukcapi	18	18	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	2,832,800	2,832,800	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			Disdukcapi	Disdukcapi									-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	61,850,250	61,850,250	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Disdukcapi	Disdukcapi									-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	7,999,700	7,999,700	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disdukcapi	Disdukcapi	3	3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	563,477,000	1,148,701,000	<b>585,224,000</b>

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang /Bertambah
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Disdukcapil	Disdukcapil	2	2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	2,352,900	2,352,900	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Disdukcapil	Disdukcapil	2	2	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	5,500,000	5,500,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	10,000,000	10,000,000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	22,050,000	22,050,000	-
	Penyediaan Bahan/Material			Disdukcapil	Disdukcapil	4	4	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	4	5,072,231,700	6,072,213,300	<b>999,981,600</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Disdukcapil	Disdukcapil	25	25	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	74,992,600	191,857,000	<b>116,864,400</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Disdukcapil	Disdukcapil									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Disdukcapil	Disdukcapil		5	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4	-	151,008,000	<b>151,008,000</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Disdukcapil	Disdukcapil									

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang /Bertambah
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Disdukcapil	Disdukcapil	3	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	3	242,458,900	258,280,900	<b>15,822,000</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	61,307,000	192,407,000	<b>131,100,000</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Disdukcapil	Disdukcapil									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Disdukcapil	Disdukcapil	15	15	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	106,900,000	106,900,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Disdukcapil	Disdukcapil	20	20	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	30,804,700	30,804,700	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Disdukcapil	Disdukcapil	1	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	471,744,000	471,744,000	-
												<b>15,518,340,650</b>	<b>17,518,340,650</b>	<b>2.000.000.000</b>



---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yaitu pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019 – 2024. Pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 mencakup 32 sub kegiatan dalam 5 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **7.1. Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mempersyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram.



---

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas;
7. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023. Selama realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon tahun 2023, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon

## **7.2. Kaidah Pendanaan**

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini yaitu:

1. Peningkatan atau sekurang-kurangnya dapat dipertahankan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan

---

peraturan perundangan-undangan, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip di atas, diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan dan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Semoga Program kerja yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat tercapai.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 051.2/Kep.728 – Disdukcapil/2023**

**LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang



- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk



Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.34-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/ Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan



informasi terkait

- 1) data hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas tahun sebelumnya.
- 2) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2023 terutama prioritas nasionalnya.
- 3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.

- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. menyusun rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.
- f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.728 - Disdukcapil/2023

TANGGAL : 21 Juli 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I Penanggung jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- III Sekretaris I : Sub Kordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sekretaris II : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- IV Kelompok Kerja
- Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Anggota : 1. Sub Koordinator Identitas Penduduk  
2. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk  
3. Dewanti, S.E
- Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Anggota : 1. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian  
2. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan  
3. Kasubag Keuangan dan Asset  
4. Pengurus Barang  
5. Ana Rashana K, SH
- Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Anggota

- : 1. Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
3. Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
4. Eska Apri Pujiyanto, A.Md.

BUPATI CIREBON,

